

**PENGUMUMAN  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2021/Khusus - Awal Menjabat)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
**UNIT KERJA** : DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, TATA RUANG DAN  
PERTANAHAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : MUHAMMAD BUDI EKO SETIAWAN
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 790289

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 500.242.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 269 m2/269 m2 di KOTA TEGAL ,  
HASIL SENDIRI Rp. 200.242.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/180 m2 di TEGAL, HASIL  
SENDIRI Rp. 300.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 34.000.000

1. MOTOR, HONDA SCOPY MATIC Tahun 2018, HASIL SENDIRI  
Rp. 10.000.000
2. MOTOR, HONDA PCX MATIC Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.  
24.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ----**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 116.800.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 651.042.000**III. HUTANG** Rp. 479.167.471**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 171.874.529

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi



memenuhi kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.